

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PELESTARIAN SENI TRADISIONAL
(Studi Kasus di Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung)**

**POLICY IMPLEMENTATION OF PRESERVATION TRADISIONAL ART
(Case Study In The Departement Of Culture and Tourism Of The City Of Bandung)**

Dian Susanti

Program Studi Ilmu Pemerintahan
Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Langlangbuana
die.diedian@gmail.com

ABSTRAK

Latar belakang masalah dari penelitian ini adalah belum optimalnya implementasi kebijakan pelestarian seni tradisional di Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung, dari latar belakang masalah tersebut peneliti mengidentifikasi masalah sebagai berikut : Bagaimana implementasi kebijakan pelestarian seni tradisional di Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung, Apa saja faktor pendukung dan penghambat implementasi kebijakan pelestarian seni tradisional di Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung dan Upaya-upaya apa yang dilakukan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung dalam melaksanakan kebijakan pelestarian seni tradisional di Kota Bandung. Landasan teori ini menggunakan teori Implementasi Kebijakan, maka peneliti merumuskan proposisi sebagai berikut: “Implementasi Kebijakan Pelestarian Seni Tradisional di Kota Bandung” akan optimal jika memperhatikan dimensi Komunikasi, Sumber daya, Disposisi dan Struktur Birokrasi. Metode dalam penelitian adalah kualitatif dan jenis penelitian yang digunakan adalah pendekatan deskriptif. Sumber data yang diperoleh melalui observasi partisipan, wawancara mendalam, studi pustaka dan dokumentasi. Sumber data yang digunakan dalam penelitian adalah data primer, data sekunder. Tehnik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data dilapangan model Miles dan Huberman yaitu pengumpulan data, penyajian data, reduksi data dan penarikan kesimpulan. Hasil dari penelitian ini adalah bahwa implementasi pelestarian seni tradisional berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Pelestarian Seni Tradisional. Dalam pelaksanaannya kebijakan, faktor-faktor yang menjadi penghambat pelaksanaan pelestarian seni tradisional dan upaya yang dilakukan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata dalam melaksanakan kebijakan pelestarian seni tradisional di Kota Bandung adalah kurangnya sosialisasi dan komunikasi aturan dan kebijakan kepada kelompok seni di Kota Bandung dan kurangnya respon terhadap kelompok-kelompok seni di Kota Bandung, kurangnya sarana dan prasarana penunjang kesenian tradisional dari Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung.

Kata Kunci : Implementasi, Pelestarian Seni Tradisional

ABSTRACT

The background of the problem of this research is that the implementation of traditional art preservation policies in the Bandung City Culture and Tourism Office is not yet optimal. From the background of the problem the researcher identifies the problem as follows: How to implement traditional art preservation policies in the Bandung City Culture and Tourism Office. What are the factors supporters and inhibitors of the implementation of traditional art

preservation policies in the Bandung City Culture and Tourism Office and what efforts have been made by the Bandung City Culture and Tourism Office in implementing policies on preserving traditional arts in the City of Bandung. The foundation of this theory uses the Policy Implementation theory, the researchers formulated the proposition as follows: "Implementation of the Policy of Preservation of Traditional Arts in the City of Bandung" will be optimal if you pay attention to the dimensions of Communication, Resources, Disposition and Bureaucratic Structure. The method in this research is qualitative and the type of research used is descriptive approach. Sources of data obtained through participant observation, in-depth interviews, literature study and documentation. Sources of data used in this study are primary data, secondary data. Data analysis techniques used in this study are data analysis in the field of Miles and Huberman models, namely data collection, data presentation, data reduction and drawing conclusions. The results of this study are that the implementation of traditional art preservation is based on Bandung City Regulation Number 5 of 2012 concerning Preservation of Traditional Art. In the implementation of the policy, the factors that hamper the implementation of the preservation of traditional arts and the efforts made by the Office of Culture and Tourism in implementing policies to preserve traditional arts in the city of Bandung are the lack of socialization and communication of rules and policies to art groups in Bandung and the lack of response to art groups in the city of Bandung, the lack of facilities and infrastructure to support traditional arts from the Bandung City Culture and Tourism Office.

Keyword: *Implementation, Preservation Traditional Art*

1. PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara yang mempunyai berbagai suku bangsa dan setiap suku bangsa mempunyai keanekaragaman budaya yang menakjubkan serta berbeda-beda sesuai dengan ciri khas setiap suku bangsa. Budaya yang dimaksud disini adalah Kesenian Tradisional yang masing-masing daerah di Indonesia memilikinya tak terkecuali dengan Kota Bandung. Kesenian juga diatur dalam Undang- Undang Nomor 5 Tahun 2017, Tentang Pemajuan Kebudayaan, yang berbunyi :

“Salah satu bagian dari kebudayaan adalah Kesenian Tradisional, Kesenian Tradisional memiliki bobot besar dalam kemajuan kebudayaan bangsa dan peradabannya. Dan secara timbal balik dibawah serta oleh kemajuan keseniannya. Kesenian Tradisional juga merupakan sarana yang digunakan untuk mengekspresikan rasa keindahan dalam jiwa manusia . secara umum kesenian dapat mempererat ikatan solidaritas suatu masyarakat dilingkungan sekitar .”

Masyarakat perlu melestarikan Kesenian Tradisional yang daerahnya miliki. Namun tidak terlepas dari bantuan tangan pemerintah. Dan pemerintah yang berperan aktif dalam upaya pelestarian ini ialah pemerintah kota setempat yang kebijakannya harus dilaksanakan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata kota setempat. Pemerintah Daerah Kota Bandung telah mengeluarkan beberapa kebijakan menyangkut kesenian daerah (tradisional). Beberapa tertuang pada Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 5 tahun 2012 tentang Pelestarian Seni Tradisional yang berbunyi.

1. Pemerintah wajib melaksanakan pelestarian seni tradisional di daerah.
2. Menyelenggarakan pelayanan di bidang kesenian sesuai standar pelayanan bidang kesenian, menumbuh kembangkan partisipasi dan kreativitas masyarakat yang berasaskan gotong royong, kemandirian dan berkeadilan.

3. Menyediakan gedung pertunjukan yang representatif sebagai tempat seniman berkreasikan dan apresiasi seni tradisional dilokasi yang strategis dan mudah diakses.
4. Menyediakan tempat pendokumentasian dalam bentuk deskripsi, gambar, foto, audio visual, wujud karya dan tiruannya.
5. Mengkoordinasikan kegiatan instansi vertikal di daerah dalam rangka perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan seni tradisional.
6. Masyarakat berhak memperoleh informasi yang berkaitan dengan penyelenggaraan festival seni pertunjukan, seni pameran, dan seni lomba.

2. Tinjauan Teoritis

2.1 Pengertian Implementasi

Menurut Daniel A Mazmanian dan Paul Sabatier (1979) sebagaimana dikutip dalam buku Solihin Abdul Wahab (2008 :65), mengatakan bahwa yaitu :

“implementasi adalah memahami apa yang senyatanya terjadi sesudah suatu program dinyatakan berlaku atau dirumuskan merupakan fokus perhatian implementasi kebijaksanaan yakni kejadian-kejadian dan kegiatan-kegiatan yang timbul sesudah disahkannya pedoman-pedoman kebijaksanaan negara yang mencakup baik usaha-usaha untuk administrasi maupun untuk menimbulkan akibat atau dampak nyata pada masyarakat atau kejadian-kejadian”.

2.2 Teori-teori Implementasi

Implementasi adalah suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci. Secara sederhana implementasi bisa diartikan pelaksanaan atau penerapan. Majone Wildavsky (dalam Nurdin dan Usman,2002) mengemukakan

implementasi sebagai evaluasi, brown dan wildavsky (dalam buku Nurdin dan Usman 2004:70) mengemukakan bahwa implementasi adalah perluasan aktivitas yang saling menyesuaikan”. Pengertian implementasi sebagai aktivitas yang saling menyesuaikan juga dikemukakan oleh Mc Laughlin Subarsono (2008:89) mengemukakan beberapa teori dari beberapa ahli mengenai implementasi kebijakan yaitu :

a. Teori George C. Edward

a) Komunikasi yaitu keberhasilan implementasi kebijakan syarat kan agar implementor mengetahui apa yang di lakukan,di mana yang menjadi tujuan dan sasaran kebijakan harus ditransmisikan kepada kelompok sasaran atau target group sehingga akan mengurangi distorsi implementasi.

b) Sumber daya dimana meskipun isi kebijakan telah dikomunikasikan secara jelas dan konsisten tetapi apabila implementor kekurangan sumber daya untuk melaksanakan maka implementasi tidak akan berjalan efektif sumber daya tersebut dapat terwujud sumber daya manusia misalnya kompetensi implementor dan sumber daya finansial.

c) Disposisi adalah watak dan karakteristik yang dimiliki oleh implementor apabila implementor memiliki disposisi yang baik maka implementor tersebut dapat menjalankan kebijakan dengan baik seperti apa yang diinginkan oleh pembuat kebijakan Edward III (1980:98) menyatakan bahwa sikap dari pelaksana kadang kala menyebabkan masalah apabila sikap atau cara pandang yang berbeda dengan pembuat kebijakan oleh karena itu untuk mengantisipasi dapat mempertimbangkan atau

memperhatikan aspek penempatan pegawai pelaksana dan intensif.

- d) Struktur birokrasi merupakan susunan komponen unit unit kerja dalam organisasi yang menunjukkan adanya pembagian kerja serta adanya kejelasan bagaimana fungsi fungsi atau kegiatan yang berbeda-beda diintegrasikan atau kegiatan yang berbeda-beda diintegrasikan atau dikoordinasikan, selain itu struktur organisasi juga menunjukkan spesialisasi pekerjaan, saluran perintah dan penyampaian laporan Edward III (1980:125) struktur organisasi yang terlalu panjang akan cenderung melemahkan pengawasan dan menimbulkan red-tape, yakni prosedur birokrasi yang rumit dan kompleks, yang menjadikan aktivitas organisasi tidak fleksibel. Aspek dari struktur organisasi adalah standard operation procedure (SOP) dan fragmentasi.

3 Konsep Kebijakan

Lingkup dari studi kebijakan publik sangat luas karena mencakup berbagai bidang dan sektor seperti ekonomi, politik, sosial, budaya, hukum dan sebagainya. Disamping itu dilihat dari hierarkinya kebijakan publik dapat bersifat nasional, regional maupun lokal seperti undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan presiden, peraturan menteri, peraturan pemerintah/provinsi, keputusan gubernur peraturan daerah kabupaten/kota dan keputusan Bupati/Walikota

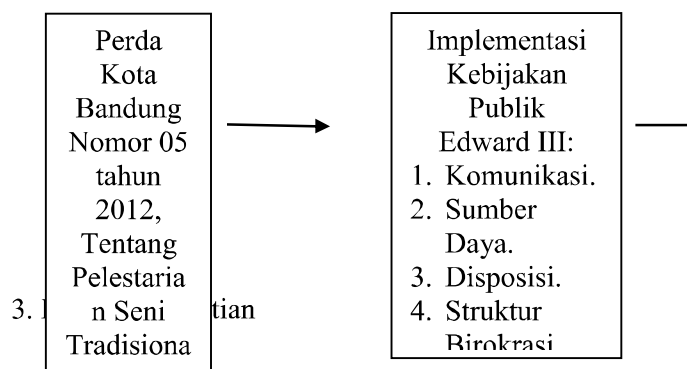
2.4 Konsep Implementasi Kebijakan

Implementasi kebijakan adalah pelaksana keputusan kebijakan dasar, biasanya dalam bentuk undang-undang. Namun dapat pula berbentuk perintah-perintah atau keputusan eksekutif yang penting atau badan peradilan lainnya, keputusan tersebut diidentifikasi masalah yang ingin diatasi, menyebutkan secara tegas tujuan atau sasaran yang ingin

dicapai dengan berbagai cara struktur atau mengatur proses implementasinya (Mazmanian dan Sabatier dalam Wahab, 2001:68).

Gambar 2.4

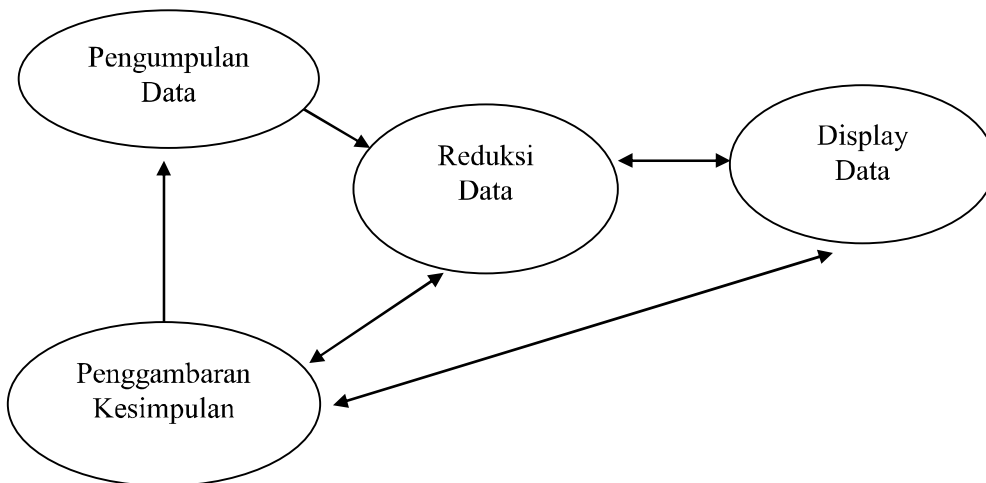
Paradigma Penelitian



Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang mana hasil yang didapatkan dilapangan tersebut, baik berupa data/dokumen, dan wawancara, dideskripsikan dan dituangkan dalam bentuk kata-kata dan bahasa.

Hasil data dengan teknik triangulasi tersebut dikuatkan dengan teknik pada Model Miles dan Huberman dalam Sugiyono (2016:91) mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus pada setiap tahapan penelitian sehingga sampai tuntas, dan datanya sampai jenuh.

Gambar 3.1 Siklus Analisis Data



(sumber Sanafiah Faisal, 1999)

4. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Kota Bandung terletak pada ketinggian 791 m di atas permukaan laut (dpl). Titik tertinggi berada di daerah Utara dengan ketinggian 1.050 m dpl, dan titik terendah berada di sebelah Selatan dengan ketinggian 675 m dpl. Wilayah yang dikelilingi oleh pengunungan membentuk Kota Bandung menjadi semacam cekungan (Bandung Basin).

Visi dinas kebudayaan dan pariwisata Kota Bandung “Mewujudkan Kota Bandung Sebagai Kota Seni Budaya Dan Tujuan Wisata Internasional 2018”

Misi dinas kebudayaan dan pariwisata Kota Bandung :

1. Mengembangkan Sumber Daya Manusia Dan Kelembagaan Kepariwisata Yang Profesional, Berkarakteristik Sunda Dan Berwawasan Global.
2. Meningkatkan Perlindungan, Pengembangan Dan Pemanfaatan Kebudayaan Dan Kesenian.
3. Mengembangkan Industri Pariwisata Yang Kreatif, Inovatif Dengan Memperhatikan Terlaksananya Sapta Pesona.
4. Meningkatkan Destinasi Pariwisata Kota Yang Berdaya Saing Tinggi Pada

Tingkat Regional, Nasional Maupun Internasional.

5. Meningkatkan Pemasaran Melalui Kemitraan Dan Kerjasama Budaya Dan Pariwisata Dengan Pemangku Kepentingan Dan/Atau Kab/Kota/Negara Lain.

Berdasarkan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 13 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 13 Tahun 2007 Tugas Pokok Dan Fungsi Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata Kota Bandung. Tugas Pokok Dinas :

1. Melaksanakan sebagian Urusan Daerah di Bidang Kebudayaan dan Pariwisata.
2. Perumusan Kebijakan Teknis Bidang Kebudayaan Dan Pariwisata;
3. Penyelenggaraan Sebagian Urusan Pemerintah Dan Pelayanan Umum Di Bidang Kebudayaan Dan Pariwisata;
4. Pembinaan Dan Pelaksanaan Tugas Di Bidang Kebudayaan Dan Pariwisata Yang Meliputi Kebudayaan Dan Kesenian, Sarana Wisata, Objek Wisata Dan Pemasaran Wisata;
5. Pelaksanaan Pelayanan Teknis Ketatausahaan Dinas;
6. Pelaksanaan Tugas Lain Yang Diberikan Oleh Walikota Sesuai Dengan Tugas Dan Fungsinya.

Dalam rangka meningkatkan kinerja pelestarian seni tradisional, tertera pada

peraturan daerah Kota Bandung Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Pelestarian Seni Tradisional khusus nya di Kota Bandung.

4.2 Pembahasan

Kegiatan Pelestarian Seni Tradisional lebih meningkatkan prestasi dalam melaksanakan program tersebut, dan menetapkan di Dinas Kebudayaan dan Pariwisata dengan kebijakan yang telah di tetapkan. Sedangkan, tujuan di evaluasi hasil pelaksanaan Program Pelestarian Seni Tradisional, dengan fokus memperoleh gambaran efektifitas pelaksanaan faktor penghambat yaitu kurang koordinasinya dalam melestarikan seni tradisional sesuai rencana akan di capai.

Untuk mengetahui pelaksanaan kegiatan Pelestarian Seni Tradisional di Kota Bandung terdapat dalam Renstra Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung, yang disitu hanya tertera penargetan tapi tidak ada evaluasi apakah target (perencanaan itu berhasil atau tidak) dan tidak menyebutkan paguyuban-paguyuban mana saja yang terlibat.

Di dalam Renstra hanya disebutkan bahwasannya untuk menjalin sosialisasi dengan pemerintah yaitu melalui kerjasama dengan :

1. Dapur Seni Budaya/Organisasi Seni Budaya.
2. Badan Pemberdayaan Masyarakat Kota.
3. Sunda Kiwari, dll.
4. Pertunjukkan/Pagelaran Seni Budaya di Sentra-sentra Seni Budaya.
5. Pertunjukan/Pagelaran Seni Budaya ke Luar Kota Bandung.
6. Penyusunan PERDA Bangunan Cagar Budaya.
7. Penyusunan PERDA tentang Seni Tradisional.

Bahkan, sarana yang difasilitasi dan dikelola secara langsung oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung, hanya :

1. Padepokan Seni Mayang Sunda

Gedung Padepokan Seni Mayang Sunda yang terletak di Jalan Peta No. 209 Bandung merupakan sarana pagelaran seni budaya indoor dan outdoor yang telah dilakukan rehabilitasi/renovasi untuk memberikan ruang aspirasi yang representative khususnya bagi para seniman dan budayawan Kota Bandung.

Penanganan pengelolaan Padepokan Seni Mayang Sunda berada dibawah Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung, secara rutin melaksanakan kegiatan pagelaran seni budaya serta memfasilitasi kegiatan latihan bagi para seniman/budayawan/lingkungan seni yang ada di Kota Bandung.

2. Kampung Pasir Kunci

Kampung Pasir Kunci dengan luas lahan ±1,2 Ha, berada di Kecamatan Ujung Berung merupakan lahan pedesaan yang telah terbangun beberapa bangunan kayu (joglo), kola mikan serta area pagelaran seni budaya.

Kondisi saat ini masih perlu dilakukan penataan fisik dan peningkatan fasilitas pendukung yang diproyeksikan sebagai kampung wisata seni dan budaya.

A. Koordinasi Antar Paguyuban Lingkung Seni Dalam Program kebijakan Pelestarian Seni Tradisional di Kota Bandung

Pelaksanaan kebijakan program kebijakan Pelestarian Seni Tradisional, melalui faktor Struktur Birokrasi masih dianggap belum optimal dikarenakan beberapa faktor yaitu seperti, dengan tidak mengikutinya prosedur yang telah ditetapkan, masih ada beberapa aparat pelaksana yang tidak mengikuti aturan tersebut, juga tidak berjalannya secara efektif koordinasi antar unit saat melaksanakan program kebijakan Pelestarian Seni Tradisional sehingga

program tersebut tidak bisa dikatakan terlaksana secara optimal.

Faktor Pendukung dan Penghambat Pelaksanaan Kegiatan kebijakan Pelestarian Seni Tradisional di Kota Bandung

Faktor Pendukung :

- a. Peraturan Daerah Nomor 05 Tahun 2012 Tentang Seni Tradisional Kota Bandung
- b. Adanya kerjasama dengan instansi terkait antara lain :
 - Dinas Kebudayaan dan Pariwisata;
 - Pihak Paguyuban Lingkungan Seni
 - Dewan Kesenian
 - Pelaku Seni
- c. Sumber daya yang memadai; Maksudnya ialah memadainya jumlah staf, keahlian dari para pelaksana, informasi yang relevan dan cukup untuk mengimplementasikan kebijakan dan pemenuhan sumber-sumber terkait dalam pelaksanaan program, adanya kewenangan yang menjamin bahwa program dapat diarahkan kepada sebagaimana yang diharapkan.
- d. Tersedianya Anggaran. Maksudnya ialah berupa dana yang di berikan pemerintah untuk melakukan pelaksana program agar tercapainya tujuan dari program tersebut.
- e. Banyaknya pagelaran seni dan event Seni Budaya secara periodic dan berkesinambungan
- f. Banyaknya lingkungan Seni, pelaku seni dan komunitas Seni Budaya.
- g. Banyaknya kreator Seni dan Budaya.
- h. Banyaknya nilai-nilai peninggalan seni budaya yang harus dilestarikan.
- i. Banyaknya seniman budayawan Kota Bandung yang berprestasi baik di tingkat regional, nasional maupun internasional.
- j. Tersedianya tempat pertunjukan atau pagelaran seni budaya.

k. Terdapatnya aturan-aturan mengenai seni budaya di Kota Bandung.

Faktor Penghambat :

- a. Kurangnya sosialisasi aturan kebijakan tentang program kebijakan Pelestarian Seni Tradisional dari aparat pelaksana kepada pihak paguyuban lingkungan seni.
- b. Kurangnya kerjasama dengan instansi terkait seperti misalnya dengan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata.
- c. Kurangnya konsistensi dari aparat pelaksana Maksudnya ialah ketidak konsistenan aparat dalam melaksanakan program sesuai dengan kebijakan mengakibatkan suatu program tidak berjalan dengan semestinya.
- d. Belum cukup tersedianya gedung pertunjukan seni budaya yang representative
- e. Belum seluruhnya lingkungan seni dan komunitas budaya yang memenuhi syarat terlegalisasi.
- f. Belum optimalnya pemberian penghargaan kepada pelaku seni, lingkungan seni, komunitas seni dan insan-insan seni budaya yang telah memberikan kontribusi bagi kemajuan kebudayaan dan kesenian serta pembangunan Kota Bandung
- g. Belum adanya perencanaan yang sistemik mengenai penentuan lokasi kawasan seni dan budaya di Kota Bandung
- h. Tingkat kesadaran pelaku seni, lingkungan seni dan komunitas budaya terhadap legalitasnya masih kurang
- i. Belum adanya kriteria seniman dan budayawan yang disepakati para pemangku kepentingannya
- j. Pengaruh budaya luar (Westernisasi) terhadap keberadaan

seni budaya tradisi relatif sangat tinggi

- k. Visi tiap element belum sama
1. SDM yang sangat minim kuantitasnya

4.3 Upaya Dalam Implementasi Kebijakan Pelestarian Seni Tradisional

Untuk mencapai tujuan dalam upaya implementasi kebijakan pelestarian seni tradisional. hasil wawancara peneliti terkait dengan upaya implementasi kebijakan pelestarian seni tradisional yaitu menjabarkan dalam 4 upaya sasaran strategis yaitu sebagai berikut:

1. Meningkatnya kualitas yang berbasis kebudayaan dan ekonomi kreatif
2. Meningkatnya kemajuan kebudayaan yang berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi
3. Meningkatnya daya saing dan kreativitas dan pelaku ekonomi kreatif di kota bandung
4. Meningkatnya kualitas pelayan public. indikator sasaran upaya strategis adalah indeks kepuasan masyarakat dengan target akhir dalam nilai kategori yang baik pada kebudayaan tradisional

DAFTAR PUSTAKA

Buku-buku :

- Abdoellah, Awan Y & Yudi Rusfiana. 2005. *Teori dan Analisis Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Alexandra Xanthaki. 2011. *Pengetahuan Seni Tradisional*.
- Edward, III. 2009. *Metode Implementasi Kebijakan Publik*. Jakarta: Trio Rimba Persada
- Islamy, Irfan. 2001. *Prinsip-prinsip Perumusan Kebijakan Negara*. Jakarta: Sinar Grafika
- Mc Laughlin Subarsono (2008:89). *Implementasi Kebijakan*
- Moeleong Lexy. 2007. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosadakarya
- Winarno, Budi. 2005. *Teori dan Proses Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Media Presindo

Dokumen dan Lain-lain

- Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Pelestarian Seni Tradisional
- Peraturan walikota Nomor 59 Tahun 2013 Tentang Pelestarian Seni Tradisional.
- Rencana Strategis tentang Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.